



**BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asnawi Abdullah  
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi G. Sadikin  
Jabatan : Menteri Kesehatan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Budi G. Sadikin**

Jakarta, Januari 2026

Pihak Pertama,

**Asnawi Abdullah**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Tujuan 1: Masyarakat sehat di setiap siklus hidup</b>	<b>IT 1      Usia Harapan Hidup Sehat</b>	<b>63,5 Tahun</b>
<b>II</b>	<b>Tujuan 2: Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau</b>	<b>IT 2      Cakupan Layanan Kesehatan Esensial</b>	<b>67 (Indeks)</b>
<b>III</b>	<b>Tujuan 4: Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan</b>	<b>IT 4      Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat</b>	<b>2,4 (Rasio)</b>
	Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	ISS 26    Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan mencapai target Tahunan Pembangunan**	
		ISS 27    Pengeluaran Kesehatan Total per Kapita**	
		ISS 28    Skala investasi di sektor kesehatan	0,9 miliar USD
	024.D1 Program Sumber Daya Kesehatan		
	Sasaran Program: Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	IKP 26.2    Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	30%
		IKP 26.3    Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%	60%

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		IKP 26.4 Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	91,69 (Nilai)
	Sasaran Program: Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan	IKP 27.3 Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan	30%
		IKP 28.1 Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan	21%
		IKP 28.2 Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional	65%
<b>VI</b>	<b>Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien</b>	<b>IT 6 Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan**</b>	
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*	92,16 (Nilai)
	024.WA Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKM 33.1 Nilai SAKIP BKPK	83 (Nilai)
		IKM 33.2 Nilai Kinerja Anggaran BKPK	92,75 (Nilai)
		IKM 33.3 Indeks Integritas BKPK	80 (Indeks)
		IKM 33.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK	95%
		IKD 33.1 Reviu Regulasi: a. Reviu dan prioritas seluruh regulasi Kemenkes (sampai SE Eselon I, termasuk yang digabungkan)	100%

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		untuk keluarkan Program Legislasi Kesehatan/ <i>Prolegkes</i> selesai pada 14 April 2026	
		b. Rencana Prolegkes selesai di 2026 (10 bidang dari 6 sektor)	75%
		c. Reviu Regulasi untuk Penyusunan Prolegkes Tahun 2027 selesai di September 2026	100%
		IKD 33.2 Selesaikan perencanaan advokasi regulasi terkait CKG, TBC, Peningkatan 66 RSUD, Kolegium, dan <i>Hospital Based</i> pada 14 April 2026	100%

Keterangan:

\* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)

\*\* : Kolaborator (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)

IKM : Indikator Kinerja Mandatory Program Dukungan Manajemen

IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

**Program**

1. Program Sumber Daya Kesehatan
2. Program Dukungan Manajemen

**Total Anggaran DIPA Badan Kebijakan  
Pembangunan Kesehatan**

**Anggaran**

Rp. 212.000.000.000,-

Rp. 18.479.404.000,-

**Rp. 230.479.404.000,-**

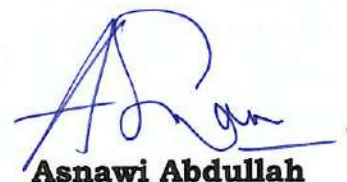
Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**Budi G. Sadikin**



**Asnawi Abdullah**

**SASARAN KINERJA PEGAWAI**  
**PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF**  
**KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

Kementerian Kesehatan

Periode Penilaian : 01 Januari sd 31 Desember 2026

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Prof. ASNAWI ABDULLAH, SKM, MHSM, MSc. HPPF, DLSHTM, Ph.D.	1	NAMA	BUDI G. SADIKIN
2	NIP	197107031995031001	2	NIP (*opsional)	-
3	PANGKAT / GOL. RUANG	Pembina Utama Madya - IV/d	3	PANGKAT / GOL. RUANG	-
4	JABATAN	Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	4	JABATAN	Menteri Kesehatan
5	UNIT KERJA	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	5	UNIT KERJA	Kementerian Kesehatan

**HASIL KERJA**

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	BOBOT (%)	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**A. UTAMA**

1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	Usia Harapan Hidup Sehat	63,5 Tahun	4,55	Penerima Layanan
2	Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	Cakupan Layanan Kesehatan Esensial	67 (Indeks)	4,55	Penerima Layanan
3	Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat	2,4 (Rasio)	4,55	Penerima Layanan
4	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	Skala investasi di sektor kesehatan	0,9 miliar USD	4,55	Proses Bisnis
5	Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	30%	4,55	Proses Bisnis
		Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%	60%	4,55	Penerima Layanan
		Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	91,69 (Nilai)	4,55	Proses Bisnis
6	Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan	30%	4,55	Proses Bisnis
		Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan	21%	4,55	Proses Bisnis
		Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional	65%	4,55	Proses Bisnis
7	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	92,16 (Nilai)	4,55	Penguatan Internal
8	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	83 (Nilai)	3,75	Penguatan Internal
		Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,75 (Nilai)	3,75	Anggaran
		Indeks Integritas Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	80 (Indeks)	3,75	Penguatan Internal
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95%	3,75	Penguatan Internal
		Reviu dan prioritas seluruh regulasi Kemenkes (sampai SE Eselon I, termasuk yang digabungkan) untuk keluarkan Program Legislasi Kesehatan/Prolegkes selesai pada 14 April 2026	100%	8,75	Penguatan Internal
		Rencana Prolegkes selesai di 2026 (10 bidang dari 6 sektor)	75%	8,75	Penguatan Internal
		Reviu Regulasi untuk Penyusunan Prolegkes Tahun 2027 selesai di September 2026	100%	8,75	Penguatan Internal
Selesaikan perencanaan advokasi regulasi terkait CKG, TBC, Peningkatan 66 RSUD, Kolegium, dan Hospital Based pada 14 April 2026	100%	8,75	Penguatan Internal		

**B. TAMBAHAN**

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

PERILAKU KERJA*		
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai

Prof. ASNAWI ABDULLAH, SKM, MHSM, MSc.HPPF, DLSHTM, Ph.D.  
NIP 197107031995031001

Jakarta, Januari 2026  
Pejabat Penilai Kinerja

BUDI G. SADIKIN

\* Pimpinan dapat memberikan Ekspektasi khusus terhadap satu atau lebih aspek perilaku kerja Pegawai.